

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Orde Baru<sup>1</sup> adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru merupakan suatu reaksi dan koreksi prinsipil terhadap praktik-praktik penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau, yang lazim disebut zaman Orde Lama. Pengertian Orde Baru yang terpenting adalah suatu Orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikad baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan yang menjunjung tinggi azas dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 – 1998, dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret, yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983, beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nama Orde Baru digunakan untuk membedakan Pemerintahan Soeharto dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Soekarno kemudian dikenal dengan Orde Lama.

<sup>2</sup> *Cuplikan Dari Pidato Pejabat Presiden Jendral Soeharto Kepada Sidang Kabinet AMPERA tanggal 19 April 1967.*

<sup>3</sup> Ghilia Indonesia, *Ketetapan-ketetapan MPR, 1983-1988, 1978-1983*, Jakarta: 1986, hlm. 43.

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan tahun 1998. Antara pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama tidak jauh berbeda sama-sama menggunakan sistem “ *Political and Role Sharing dan Partnership* (hubungan kemitraan) antara sipil dan militer ”. Perbedaannya hanya terletak pada dasar legitimasinya<sup>4</sup>, terbukti bahwa presiden Soeharto memegang kekuasaan Eksekutif sebagai hasil dari pemilihan MPRS dan MPR sejak tahun 1973. Kekuasaan Eksekutif yang kuat dan dominan dalam pemerintahan Indonesia tertulis dalam UUD 1945 pasal 5, berbunyi bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan kata lain Presiden memegang kekuasaan Eksekutif dan Legislatif sekaligus.<sup>5</sup>

Bidang pertahanan dalam negeri yaitu Lembaga Kepolisian merupakan golongan pekerjaan yang berumur tua sekali. Apabila dilihat dari sejarahnya,

---

<sup>4</sup> Legitimasi merupakan keterangan yg menunjukkan surat bukti diri atau surat identitas seseorang; pernyataan yang diakui keabsahannya; pengesahan. ( Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 899 ).

Legitimasi pada masa Orde Lama yaitu Presiden Soekarno membentuk MPRS, dan MPRS tersebut mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No. III Tahun 1963. Jatuhnya legitimasi Presiden Soekarno ditandai oleh peristiwa G30 S PKI, serta dikeluarkannya Supersemar yang pada hakekatnya merupakan bentuk penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. Sedang legitimasi masa Orde Baru adalah Presiden Soeharto memegang kekuasaan Eksekutif dengan membatasi partai politik menjadi 3 golongan yaitu partai nasional, spiritual dan karya. Selain itu pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan single majority lewat eksistensi partai Golongan Karya.

<sup>5</sup>Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo, *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1996, hlm. 34.

maka kepolisian sudah ada kurang lebih sejak abad ke-14 bahkan sampai zaman Yunani.<sup>6</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan lahir dari kandungan rakyat Indonesia. Kepolisian di Indonesia telah ada sejak masa Hindia Belanda, meskipun terdapat perbedaan antara polisi Belanda dengan polisi pribumi. Zaman Jepang polisi dari kalangan pribumi lebih banyak dari pada masa Hindia Belanda, setiap kantor polisi dikepalai oleh polisi pribumi, tetapi masih didampingi oleh polisi senior dari Jepang. Sebelum proklamasi kemerdekaan, lahir pula “Polisi Pejoang” yang ikut dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, polisi bersama rakyat saling membantu dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dalam perjalannya, mengalami perubahan-perubahan yang menyangkut organisasi, status, tugas dan fungsinya. Pada tanggal 1 Juli 1946, pemerintah mengeluarkan keputusan yang menetapkan Kepolisian Negara menjadi Jawatan Kepolisian Negara dibawah Perdana Menteri, yang pada tahun 1948, status itu untuk sementara dibawah Presiden dan Wakil presiden. Pada tahun 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) memberi keputusan Nomor 22, tentang Jawatan Kepolisian di bawah Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung dalam kebijakan politik kepolisian, sedangkan dalam masalah administrasi dan organisasi di bawah Menteri Dalam Negeri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, “Polisi dan Masyarakat Indonesia”, dalam Mochtar Lubis (Ed), *Citra Polisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm. 174.

<sup>7</sup>POLRI, *POLRI dari Masa ke Masa*, Tersedia pada, <http://www.wirasabha.web.id>, 2011, diakses pada tanggal 05 April 2013.

Ketika pemerintah berusaha mengatasi gangguan keamanan yang merebak pada tahun 1950-an, Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan selama sembilan bulan. Pada tahun 1959, dibentuk Kementerian Kepolisian, namun dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/1960 pasal 45 c antara lain dinyatakan bahwa Polisi Negara masuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).<sup>8</sup> Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 29 d Tahun 1964, yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1964, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara RI sebagai unsur ABRI dan merupakan bagian organik dari Departemen Pertahanan Keamanan ( HANKAM ).

Kepolisian pada masa Orde Baru menurut SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967, ditetapkan pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen HANKAM meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Kepolisian (AK) yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab Jenderal Soeharto. Pada waktu itu semua angkatan di dalam ABRI sedang menyusun doktrin<sup>9</sup> masing-masing. Angkatan Darat (AD) menyusun doktrinnya bernama Tri

---

<sup>8</sup>Harief Harahap, *Himpunan Peraturan – Peraturan dan Perundang – Undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973, hlm. 46.

<sup>9</sup>Doktrin yaitu sebuah ajaran (asas suatu aliran politik, keagamaan) secara bersistem khususnya dalam penyusunan kebijakan Negara. Lihat Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 272.

Ubaya Cakti. Angkatan Laut (AL) menyusun doktrinnya bernama Eka Sasana Jaya. Angkatan Udara (AU) menyusun doktrinnya bernama Swa Bhuwana Pakca. Begitu pula Angkatan Kepolisian (AK) waktu itu juga menyusun doktrin bernama Tata Tentrem Kerta Raharja.<sup>10</sup>

Masuknya Kepolisian sebagai Angkatan Kepolisian mengandung banyak segi negatifnya dari pada positifnya.

Segi Positif:

1. Kedudukan polisi di dalam ABRI setara dengan AD, AL, dan AU
2. Polisi terlibat dalam berbagai operasi keamanan bersama tentara dalam menjaga keutuhan NKRI dari berbagai gangguan, baik gangguan dari dalam maupun dari luar.

Segi Negatif:

1. Polisi tidak professional dan dijauhi masyarakat.
2. Pekerjaan polisi banyak yang diselesaikan secara militer.
3. Polisi sulit berkembang.
4. Ruang gerak polisi di pengaruhi oleh budaya militer.

Hal ini mengakibatkan polisi kurang berkembang tidak bisa menjadikan dirinya sebagai polisi sipil, tetapi lebih menunjukkan militeristik karena ketatnya integrasi dan secara umum polisi bukan merupakan angkatan perang.

Selanjutnya hubungan polisi dengan masyarakat pada saat Kepolisian menjadi Angkatan Kepolisian yang setara dengan AD, AL dan AU. Hal ini

---

<sup>10</sup>Sukrama, dkk, *Bela Negara Peningkatan Kualitas Pengamalan Wawasan Kebangsaan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua ( PJP II )*, Purna Bhakti Negara, 1996, hlm. 29.

menyebabkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian banyak pekerjaan polisi yang lebih diselesaikan “secara militer” daripada “secara polisi”. Kedudukan polisi yang demikian merupakan salah satu penyebab mengapa rakyat kurang dekat dengan polisi. Kerenggangan ini membuat polisi merasa jauh dari rakyat, begitu pula sebaliknya rakyat juga merasa jauh dari polisi.

## **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah yang berjudul “ Peralihan dari AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 ) ” maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Mengapa AKRI beralih menjadi POLRI masa Orde Baru ?
2. Bagaimana proses peralihan dari AKRI menjadi POLRI masa Orde Baru ?
3. Bagaimana peranan POLRI pada masa awal Orde Baru ?
4. Bagaimana Dampak Peralihan dari AKRI menjadi POLRI pada masa Orde Baru ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum
  - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan daya berfikir kritis, logis, dan analisis.
  - b. Sebagai sarana efektif untuk mengaplikasikan metodologi penelitian sejarah.
  - c. Melatih daya kritis objekif dan analitis dalam penulisan karya sejarah serta kepekaan pada peristiwa masa lampau untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melangkah ke masa depan.
  - d. Meningkatkan disiplin intelektual terutama dalam bidang sejarah.
2. Tujuan Khusus
  - a. Mengetahui alasan AKRI beralih menjadi POLRI masa Orde Baru.
  - b. Mengetahui proses peralihan dari AKRI menjadi POLRI masa Orde Baru.
  - c. Memberi gambaran umum mengenai peranan POLRI pada masa awal Orde Baru.
  - d. Mengetahui dampak apa yang ditimbulkan dari adanya Peralihan dari AKRI menjadi POLRI masa Orde Baru.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pembaca
  - a. Pembaca memperoleh pengetahuan tentang peralihan dari AKRI menjadi POLRI
  - b. Menambah wawasan dan pemahaman tentang peranan POLRI pada masa Orde Baru.
  - c. Pembaca memperoleh pengetahuan mengenai sejarah Militer khususnya POLRI pada masa Orde Baru.
  - d. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi penulisan karya ilmiah selanjutnya.
2. Bagi Penulis
  - a. Memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.
  - b. Sebagai tolok ukur ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama proses perkuliahan berlangsung.
  - c. Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan melalui bahan-bahan yang dikumpulkan guna mendukung penggarapan skripsi ini. Selain itu diharapkan penulis dapat berpikir lebih kritis dan objektif dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada
  - d. Penulis memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang “ Peralihan dari AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 ) ”

## E. Kajian Pustaka

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang telah menjadi peristiwa masa lampau.<sup>11</sup> Penulisan karya ilmiah di perlukan kajian pustaka. Hal ini dimaksudkan supaya peneliti dapat memperoleh data-data atau informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai permasalahan yang dikaji. Kajian pustaka atau teori merupakan telaah terhadap pustaka yang menjadi landasan pemikiran.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa literatur sebagai bahan kajian pustaka.

Latar belakang Angkatan Kepolisian beralih menjadi POLRI, dan proses terjadinya peralihan tersebut adalah dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1969, hal ini berarti polisi kembali pada kedudukan, tugas dan kewajibanya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1961, meskipun demikian polisi tetap berada di bawah payung ABRI. Selain itu juga terdapat proses peralihan dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia menjadi POLRI, serta berbagai tugas yang harus di laksanakan POLRI sebagai suatu lembaga negara dibidang militer, ada beberapa sumber, antara lain buku karangan Djoko Prakoso berjudul *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum* diterbitkan oleh Bina Aksara di Jakarta pada tahun 1987. ANRI judul *Arsip Kepolisian Negara RI 1947-1949*. bdl. , “Beberapa catatan mengenai posisi Kepolisian di Indonesia”. Memet Tanumidjaja berjudul *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian* oleh

---

<sup>11</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 19.

<sup>12</sup>Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY, 2006, hlm. 3.

Pusat Sejarah ABRI di Jakarta tahun 1971. Markus Gunawan, Endang Kesuma Astuty yang berjudul *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI* diterbitkan oleh Visi Media di Jakarta pada tahun 2009. Soeparno berjudul *Sejarah Perkembangan Kepolisian dari Zaman Klasik– Modern* oleh Pusat Sejarah ABRI di Jakarta tahun 1871. Erma Yulihastin berjudul *Bekerja sebagai Polisi* di terbitkan oleh Erlangga di Jakarta, tahun 2008.

Peranan polisi masa Orde Baru saat polisi masih di bawah payung ABRI, setelah peristiwa G 30 S 1965, dan pergantian Presiden RI dari Soekarno ke Jenderal Soeharto, serta bergabungnya polisi dengan ABRI ( Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ), sehingga POLRI terlibat dalam berbagai operasi keamanan yang bekerjasama dengan kekuatan tentara dari angkatan darat, laut dan udara. Misalnya dalam Operasi Seroja ( 1975 ).

Guna membahas permasalahan tersebut peneliti menggunakan literature berupa: buku karangan. Karya Awaloedin Djamin judul buku *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*, diterbitkan oleh Yayasan Brata Bhakti POLRI tahun 2006 di Jakarta. Dadi Rohaedi tentang *Makalah: Naskah Buku Sejarah POLRI* diterbitkan di Museum POLRI di Jakarta diakses tanggal 11 April 2013. Karya Satjipto Rahardjo judul artikel *Polisi dan Masyarakat Indonesia* dalam jurnal *Citra Polisi* diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia di Jakarta pada tahun 1988. Erma Yulihastin berjudul *Bekerja sebagai Polisi* di terbitkan oleh Erlangga di Jakarta, tahun 2008. Marieke Bloembergen judul *Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Ketakutan dan Kepedulian* oleh Kompas di Jakarta. Koesnodiprojo judul *Himpunan UU, Peraturan –*

*Peraturan, Penetapan – Penetapan Pemerintah RI 1945-1949* oleh SK Seno di Jakarta tahun 1951. Harsja W. Bachtiar judul *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru* oleh PTIK dan Grasindo di Jakarta tahun 1994. Karjadi M berjudul *Polisi (Status – Tugas Kewajiban – Wewenang)* diterbitkan oleh Politeia di Bogor tahun 1976. Harief Harahap yang berjudul *Himpunan Peraturan – Peraturan dan Perundang – Undangan Republik Indonesia* diterbitkan oleh Pradnya Paramita di Jakarta pada tahun 1973. D,N Aidit judul *PKI dan Polisi* oleh Yayasan Pembaharuan di Jakarta tahun 1963. Djoko Prakoso judul *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum* oleh Bina Aksara di Jakarta tahun 1987.

Dampak yang timbul setelah adanya peralihan dari Angkatan Kepolisian menjadi POLRI, adalah kesejahteraan POLRI sebelum dan setelah terjadi peralihan dari AKRI menjadi POLRI pada masa Orde Baru boleh dikatakan belum mencukupi bagi kehidupan keluarga mereka. Banyaknya beban tugas POLRI dan segenap resiko yang harus dihadapi, rasanya tidak sebanding dengan gaji dan kesejahteraan lain yang diterimanya. Selain itu hubungan yang terjadi antara POLRI dengan masyarakat masih dalam perbaikan kearah yang lebih baik, yang sesuai dengan fungsinya sebagai alat Negara penegak hukum serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bawa dalam membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan literature berupa: karya Satjipto Rahardjo judul artikel *Polisi dan Masyarakat Indonesia* dalam jurnal *Citra Polisi* diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia di Jakarta pada tahun 1988. Zainal Abidin judul artikel *Dinamika Peran Polisi dalam Masyarakat* dalam buku *Polisi, Masyarakat dan Negara* diterbitkan oleh Bigraf Publising di Yogyakara pada tahun 1995.

Thomas Hutasoit berjudul *Menjadi Polisi yang Dipercaya Masyarakat: Tahapan Perjalanan Reformasi Polisi* oleh Mabes POLRI di Jakarta tahun 2004. Momo Kelana berjudul *Hukum Kepolisian* oleh PTIK di Jakarta tahun 1981.

#### F. Historiografi yang relevan

Penulisan karya sejarah diperlukan adanya sumber-sumber yang relevan. Sumber tersebut berupa data atau informasi seputar masalah yang dikaji. Historiografi yang relevan merupakan kajian-kajian historis yang mendahului penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Hal tersebut berfungsi sebagai pembeda, sekaligus sebagai bentuk penunjukan orisinalitas tiap-tiap peneliti.<sup>13</sup> Setiap sejarawan memiliki penafsiran yang berbeda, meskipun fakta atau sumber yang digunakan oleh para peneliti sama.

Historiografi yang relevan adalah rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau.<sup>14</sup> Sebagai bagian dari proses untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau, peranan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian sejarah itu dinamakan dengan penelitian yang relevan, atau dengan kata lain historiografi yang relevan berfungsi untuk membantu dalam merekonstruksi sejarah yaitu

---

<sup>13</sup>Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi, *loc.cit.*,

<sup>14</sup>Louis Gottschalk, “understanding History: A Prime of History Method”. a.b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 35.

sebagai sumber referensi maupun perbandingan sehingga diharapkan sejarawan mampu menekan subjektifitas dalam penelitiannya.

Skripsi karya Wildan Fathuroji yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anggota TNI Angkatan Darat Tentang Hukum Kedisiplinan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Bandung tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang pentingnya kedisiplinan dari setiap Anggota TNI AD baik waktu maupun dalam berperilaku. Skripsi ini juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi Polisi Militier sebagai penegak hukum dengan cara militer untuk semua anggota TNI khususnya AD yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Perbedaan dengan penelitian diatas, bahwa tugas POLRI adalah sebagai penegak hukum, menjaga ketertiban dan keamanan, serta melayani dan mangayomi dikalangan masyarakat umum, hal ini terjadi setelah mengalami peralihan dari Angkatan Kepolisian sejenis angkatan perang ke POLRI.

Skripsi karya Rachman Hakiki yang berjudul Peranan Penyidik POLRI Sebagai Penuntut dalam Sistem Acara Cepat, Studi Kasus Putusan Pengadilan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang kedudukan POLRI dalam system hukum acara pidana adalah sebagai salah satu penyidik yang diatur dalam Undang-Undang, anggota polisi yang dapat menjadi penyidik adalah pejabat polisi yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Satu, selanjutnya dijelaskan dalam skripsi ini tentang beberapa langkah-langkah dalam melakukan tindakan penyidikan. Perbedaan dengan penelitian diatas, bahwa penelitian ini tidak hanya membahas

tentang kedudukan polisi sebagai penyidik atau penegak hukum saja, tetapi penelitian ini juga menjelaskan tentang hubungan polisi dengan masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan tugas lainnya yang tertera dalam Undang-Undang No 13 tahun 1946.

Skripsi karya Ferli Permatasari yang berjudul Korps Kepolisian Republik Indonesia di Yogyakarta ( 1946-1949 ), Program Studi Sejarah, Universitas Andalas, Padang tahun 2006. Skripsi ini membahas kedudukan, tugas Korps Kepolisian yang bertugas di Yogyakarta, bersama-sama dengan tentara dalam rangka menghadapi serangan dari pihak Belanda, baik Agresi Militer Belanda I dan II sekitar tahun 1946-1949, yang selanjutnya menjadi polisi istimewa, penelitian tersebut menekan pada masa refolusi fisik. Perbedaan dengan penelitian di atas yaitu bahwa penelitian ini membahas tentang polisi pada masa Orde Baru, serta peralihan dari Angkatan Kepolisian ke polisi yang kembali bertugas ditengah-tengah masyarakat dan bukan sebagai polisi istimewa.

Skripsi karya Ratna Amalia yang berjudul Eksistensi Militer dalam Politik di Indonesia Masa Orde Baru ( 1966-1998 ), Studi tentang Dwifungsi ABRI, Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2007. Skripsi ini di jelaskan tentang pemerintahan masa Orde Baru, tentang pembahasan pelaksanaan fungsi politik ABRI yang difokuskan pada dominasi Angkatan Darat, selanjutnya menekankan pada peranan ABRI dalam lembaga eksekutif dan legislative, serta kebijakan terhadap militer tentang Dwifungsi ABRI. Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, bahwa penelitian ini tentang peralihan dari Angkatan Kepolisian Negara Republik

Indonesia menjadi POLRI pada masa Orde Baru 1966 – 1970. Di dalamnya membahas tentang peranan Angkatan Kepolisian masa Orde Baru, proses peralihan, dan dampak dari peralihan tersebut.

## **G. Metode dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahap dalam proses penelitian sejarah terdiri dari tahap Pemilihan Topik, *Heuristik* ( Pengumpulan Sumber ), *Verifikasi* ( kritik sumber ), Interpretasi dan Penulisan Sejarah ( historiografi, penjelasan, penyajian ).

#### **a. Pemilihan Topik**

Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam penelitian untuk menentukan permasalahan yang hendak dikaji. Dalam sebuah penelitian topik harus di pilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional.<sup>15</sup> Dua syarat ini sangat penting, karena orang hanya akan bekerja dengan baik kalau dia senang. Hal ini diperlukan agar dapat mendalami permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis “ Peralihan dari AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 ) ”.

Pemilihan topik ini didasari atas beberapa dasar pemikiran di atas, bahwa politik, sosial, hukum dan militer itu saling berdampingan.

---

<sup>15</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 89.

b. *Heuristik* ( pengumpulan sumber )

*Heuristik* merupakan kegiatan pengumpulan sumber yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder.<sup>16</sup> Heuristik berasal dari kata *Heuriskein* dalam bahasa Yunani yaitu menemukan, sehingga heuristik adalah kegiatan sejarawan untuk mengumpulkan sumber.<sup>17</sup> Pada dasarnya sumber sejarah terdiri dari tiga macam sumber. Pertama, sumberbenda (artifak) dapat berupa foto-foto, alat-alat atau bangunan sedapat mungkin bangunan asli. Kedua, sumber lisan yang berperan dalam mengembangkan substansi penulisan sejarah. Ketiga, sumber tertulis dapat berupa surat-surat, notulen, rapat, kontrak kerja dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian historis dengan melakukan studi pustaka. Perolehan data, peneliti melakukan studi literatur dan dokumen sejarah mengenai “ Peralihan AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 ) ” secara lengkap dan menyeluruh. Data-data ini diperoleh dari buku-buku yang ada diberbagai perpustakaan diantaranya: Unit Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, Perpustakaan Daerah Purworejo, Perpustakaan Daerah Wonosobo, Perpustakaan POLRES Daerah Kabupaten Purworejo, ANRI ( Arsip Nasional Republik Indonesia ), Perpustakaan Museum POLRI.

Berikut ini sumber-sumber yang didapat kemudian dikategorikan berdasarkan sifatnya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder yang digunakan

---

<sup>16</sup>Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>17</sup>Sardiman AM, *Memahami Sejarah*, Yogyakarta: FIS UNY dan Bigraf Publishing, 2004, hlm. 101-102.

untuk mengkaji “ Peralihan AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 ) ”.

### 1) Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau alat mekanis seperti Diktafon ( yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan atau saksi pandangan mata ). Dalam penelitian sekripsi ini peneliti menggunakan sumber primer berupa buku karya

Awaloedin Djamin. (2006). *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI.

Harsja W. Bachtiar. (1994). *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*. Jakarta: PTIK dan Grasindo.

Memet Tanumidjaja. (1971). *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Soeparno. (1871). *Sejarah Perkembangan Kepolisian dari Zaman Klasik-Modern*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Soeparno Soeria Atmadja. (1983). “ *Suatu Tinjauan Tentang Asal Mula Perkembangan Kepolisian dalam Masyarakat* ”. Jakarta: PTIK

### 2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang kedua yang memperoleh berita dari sumber primer atau dari seseorang yang secara tidak langsung melakukan pandangan mata atau hadir pada saat peristiwa itu disahkan. Pada dasarnya sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi mata yakni orang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dimaksud. Sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Audit, D.N. (1963). *PKI dan Polisi*. Jakarta: Yayasan Pembaharuan.

- Ambar Wulan G. (2009). *Polisi dan Politik: Intelejen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*. Jakarta: Rajawali Press.
- Awaloedin Djamin. (1995). “Struktur Kelembagaan dan Professionalisme Polisi”. dalam Banurusman (Ed). *Polisi, Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: Bigraf Pubilshing.
- Dadi Rohaedi. (2013). “ Kepolisian Negara RI 1945 – Sekarang ”. *Makalah*, Diskusi tentang sejarah lahirnya Lembaga Kepolisian. Jakarta: Museum POLRI.
- \_\_\_\_\_. (2013). “ Makna dan Hakekat Hari Bhayangkara ”. *Makalah*, Diskusi tentang sejarah lahirnya Lembaga Kepolisian. Jakarta: Museum POLRI.
- \_\_\_\_\_. (2013). “ Naskah Buku Sejarah POLRI ”. *Makalah*, Diskusi tentang sejarah lahirnya Lembaga Kepolisian. Jakarta: Museum POLRI.
- Djoko Prakoso. (1987). *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Erma Yulihastin. (2008). *Bekerja sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- Hutasoit Thomas. (2004). *Menjadi Polisi yang Dipercaya Masyarakat: Tahapan Perjalanan Reformasi Polisi*. Jakarta: Mabes POLRI.
- Karjadi M. (1976). *Polisi ( Status – Tugas Kewajiban – Wewenang )*. Bogor: Politeia.
- Koesparmono Irsan. (1995). “Inovasi Struktur Kelembagaan dalam Menciptakan Profesionalisme POLRI”. dalam Banurusman (Ed). *Polisi, Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: Bigraf Pubilshing.
- Markas Besar Kepolisian Negara RI. (1970). *Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI*. Jakarta: Inkopak.
- Momo Kelana. (1981). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Muhammad Farouk. (2005). *Menuju Reformasi POLRI*. Jakarta: PTIK Press.
- Oudang, M. (1952). *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI.
- Satjipto Rahardjo. (1988). “Polisi dan Masyarakat Indonesia”. Dalam Mochtar Lubis (Ed). *Citra Polisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suwarni. (2010). *Reformasi Ke-Polisi-an: Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press.

c. *Verifikasi* ( kritik sumber )

Kritik sumber merupakan uji keabsahan sumber yang telah didapat. *Verifikasi* ada dua macam, yaitu kritik intern dan kritik eksternal.<sup>18</sup> Kritik sumber bertujuan untuk menghindari kepalsuan sumber, yang mana sumber yang digunakan kebanyakan sumber sekunder. Dengan demikian, peneliti melakukan pemilihan sumber secara cermat dan maksimal supaya mendekati kebenaran.

1) Kritik eksternal: Otentisitas dan integritas

Kritik eksternal ialah cara melakukan *verifikasi* atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian yang ketat.

2) Kritik internal

Kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal adalah istilah yang menekankan aspek “dalam” yaitu “isi” dari sumber, kesaksian (*testimoni*). Kritik internal dapat di tempuh dengan mengadakan penelitian instrinsik terhadap sumber-sumber yang didapat (untuk mengetahui informasi dari informan dengan peristiwa) dan membanding-bandingkan data dari berbagai sumber. Langkah ini baru dilaksanakan sesudah kritik eksternal selesai untuk menentukan bahwa dokumen yang kita peroleh merupakan dokumen yang kita cari, bukan saja berarti

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 99.

relevan dengan topik yang disusun, tapi lebih penting lagi bahwa sumber-sumber itu adalah sumber-sumber yang otentik.<sup>19</sup> Kritik yang telah dilakukan oleh peneliti pada akhirnya akan menghasilkan fakta-fakta sejarah. Kritik sumber inilah yang menjadi tolok ukur kualitas dari penelitian mengenai “ Peralihan AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 ) ”.

d. Interpretasi

Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, kemudian menganalisa sumber yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Tahap ini peneliti dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh.<sup>20</sup> Selanjutnya peneliti menjelaskan keterkaitan antara fakta-fakta sejarah sehingga memiliki makna dan bersifat logis tentang hal yang diteliti, tahap ini peneliti merangkum, menghubungkan, fakta-fakta yang diperoleh menjadi satu kesatuan. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu, sehingga orang lain dapat melihat sendiri dan menafsirkan kembali.

e. Penulisan

Merupakan penggambaran atau pengisahan kembali suatu runtutan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan data yang telah diperoleh dan telah diuji kebenarannya, dalam penulisan sejarah aspek kronologis sangat penting.

---

<sup>19</sup>I Gede Widja, *Sejarah Lokal Suatu Prespektif dalam Pengajaran Sejarah*, 1989, hlm. 24.

<sup>20</sup>Kuntowijoyo, 2005, *op.cit.*, hlm. 99.

Penulisan sejarah hendaknya dilakukan secara kronologi, sistematis dan menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah.

Penulisan sejarah merupakan titik puncak dari seluruh kegiatan penelitian sejarah. Historiografi merupakan bagian terakhir yang terberat, karena di bidang ini letak tuntutan terberat bagi sejarah untuk membuktikan legitimasi dirinya sebagai suatu bentuk disiplin ilmiah.<sup>21</sup>

Pada penulisan ini, peneliti akan mengkaji tentang peralihan dari AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis tahun 1966-1970, dengan memperhatikan beberapa prinsip urutan peristiwa, urutan waktu, dan hubungan sebab akibat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam penelitian. Pandangan yang semakin meluas terhadap peristiwa sekitar manusia sebagai hasil dari banyaknya data yang terkumpul, metode yang semakin efisien serta terminologi-terminologi eksak dari cabang-cabang ilmu sosial menuntut agar ilmu sejarah menggunakan hasil yang diperoleh dari disiplin ilmu lain.<sup>22</sup>

Penulisan skripsi mengenai “*Peralihan AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 )*” ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, sosial, hukum dan militer.

---

<sup>21</sup>Poespoprodjo, *Subjektifitas Dalam Historiografi*, Bandung: Remadja Karya, 1987, hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

### a. Pendekatan Politik

Pendekatan politik, merupakan bermacam-macam tindakan yang dilakukan dalam sistem guna mencapai tujuan.<sup>23</sup> Menurut Kuntowijoyo, perhatian ilmu politik adalah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan consensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik dan sebagainya.<sup>24</sup>

Menurut Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa politik terdiri atas beberapa konsef politik, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian atau alokasi.<sup>25</sup> Menurut Sartono Kartodirdjo pendekatan politik adalah suatu pendekatan yang mengarah pada struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan politik, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Pendekatan politik ini digunakan oleh peneliti untuk mengkaji keadaan politik intern polisi dan struktur kepemimpinan polisi di bawah naungan ABRI, sebagai Angkatan keempat, serta kaitannya dengan peralihan dari AKRI ke POLRI, yang berarti merubah status, tugas, kedudukan dan wewenang lembaga Kepolisian indonesia.

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 12.

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. 173.

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>26</sup> Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 4.

### b. Pendekatan Sosial/Sosiologi

Pendekatan sosiologi dalam sejarah diperlukan untuk dapat menelaah berbagai peristiwa sejarah. Sejarah juga berperan dalam menjelaskan aktivitas kolektif manusia pada masa lampau.<sup>27</sup> William Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Sedang Roucek dan Warren berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu tentang hubungan antara manusia dan kelompok-kelompoknya.<sup>28</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk melihat interaksi dalam suatu masyarakat, organisasi, bangsa dan negara. Selanjutnya pendekatan ini digunakan untuk mengkaji: 1) bagaimana interaksi POLRI dengan angkatan yang lain, 2) bagaimana interaksi POLRI dengan masyarakat, 3) bagaimana hubungan kerjasama yang baik antara sesama POLRI.

### c. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penetapan-penetapan ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku secara universal. Van Kan merumuskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia, sedangkan menurut Meyers merumuskan bahwa hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah dan penilaian yang berhubungan dengan perbuatan

---

<sup>27</sup>Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 98.

<sup>28</sup>Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 70.

manusia sebagai anggota masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya.<sup>29</sup>

Dari pengertian hukum di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hukum itu selalu ada hubungannya dengan manusia dalam arti ada hukum karena ada manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.
2. Manusia baik berdiri sendiri sebagai individu maupun dalam kelompok sebagai mahluk sosial mempunyai kepentingan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji undang-undang, Keputusan Presiden dan keputusan-keputusan pemerintah yang mengatur struktur organisasi lembaga Kepolisian selain sebagai penegak hukum polisi juga memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri sesuai dengan UU No. 13 tahun 1961, selanjutnya tentang sumber-sumber hukum kepolisian selain dari undang-undang, seperti kebiasaan praktek Kepolisian, dan ilmu pengetahuan yang dilakukan, serta mengatur terjadinya peralihan dari AKRI ke POLRI.

d. Pendekatan Militer

Pendekatan militer merupakan kebijakan mengenai pelaksanaan perang untuk menentukan baik buruk serta besar kecilnya potensi dan kekuatan negara, dengan demikian aktivitas militer mengikuti aktivitas politik suatu negara.<sup>30</sup> Pendekatan militer dalam penulisan sejarah tidak selalu digunakan untuk

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Meode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 11-12.

<sup>30</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, *Suatu Pengantar dalam Ilmu Perang*, Jakarta: Intermasa, 1981, hlm. 66.

mengkaji sebuah perang, akan tetapi dapat digunakan untuk mengkaji organisasi dalam militer sendiri.

Martin Shaw mengemukakan bahwa militer bukanlah masalah agresifitas, atau mengagungkan perang dan institusi militer, militer adalah sejauh mana organisasi dan nilai-nilai militer mempengaruhi struktur sosial.<sup>31</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji struktur organisasi dalam tubuh polisi yang mempengaruhi peralihan dari AKRI ke POLRI, peranan polisi dalam menghadapi beberapa operasi gabungan dengan ABRI guna menghadapi pemberontakan baik dari dalam maupun dari luar dan untuk menjalankan tugas polisi selain untuk membantu ABRI, juga memberi keamanan di dalam lingkungan masyarakat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan dalam Skripsi ini tentang “*Peralihan AKRI ke POLRI : Sebuah Analisis Historis ( 1966 – 1970 )*” disusun dalam beberapa bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-sub bab sebagai berikut.

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan atau Bab I (pertama) berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian, sistematika pembahasan dari skripsi ini.

---

<sup>31</sup>Martin Shaw, *Bebas dari Militer: Analisa Sosiologis Atas Kecendrungan Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 20-21.

## **Bab II Peralihan dari AKRI menjadi POLRI pada masa Orde Baru**

Bab kedua menjelaskan mengenai sekilas sejarah lahirnya lembaga Kepolisian pra Orde Baru, latar belakang AKRI beralih menjadi POLRI, selanjutnya bagaimana proses terjadinya peralihan,

## **Bab III Peranan Kepolisian pada masa awal Orde Baru**

Pada bab ketiga ini akan membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap tugas-tugas Kepolisian, kewajiban dan wewenang dari lembaga Kepolisian, serta bagaimana profesionalisme polisi pada masa Orde Baru.

## **Bab IV Dampak Peralihan dari AKRI menjadi POLRI**

Pada bab keempat ini membahas tentang dampak yang akan timbul dari adanya peralihan tersebut seperti tingkat kesejahteraan POLRI dan Hubungan yang terjadi antara POLRI dengan masyarakat.

## **Bab V Kesimpulan**

Pada bab kelima berisi kesimpulan tentang apa yang sudah disampaikan dalam penulisan. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan pokok yang disajikan di dalam rumusan masalah.